

2022

Program Pelatihan

Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF







KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, sehingga Buku Program Pelatihan Tahun 2022 ini dapat disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreati/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, Kemenparekraf/Baparekraf terus berkomiten untuk membangun SDM Kemenparekraf/Baparekraf yang kompeten dan profesional

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu unit kerja yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, terus melakukan akselerasi melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan menerapkan nilai-nilai profesional, adaptif, kreatif, sinergi dan inovatif

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuatitas SDM Kemenparekraf/Baparekraf

Sandiaga Salahuddin Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

▶▶▶▶ | **DAFTAR ISI** | ◀◀◀◀

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI	iii

MANAJERIAL

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	2
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	4
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS)	6

FUNGSIONAL

Pelatihan Calon Analis Kebijakan	9
Pelatihan Khusus Analis Kebijakan	10
Pelatihan Fungsional Perencana Pertama	11
Pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	13
Pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	14
Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang - Undangan	15
Pelatihan Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Ahli	17
Pelatihan Statistisi Tingkat Keahlian	19
Pelatihan Pranata Komputer Tingkat Terampil	20
Pelatihan Pranata Komputer Tingkat Ahli	21
Pelatihan Arsiparis Tingkat Terampil	22
Pelatihan Arsiparis Tingkat Keahlian	23



TEKNIS PENUNJANG FUNGSIONAL

Pelatihan <i>Policy Brief, Policy Paper, Policy Memo, Dan Regulatory Impact Of Assessment (RIA)</i>	25
Pelatihan Teknis Manajemen ASN	27
Pelatihan Fasilitator Daring	28



DAFTAR ISI

TEKNIS

Pelatihan Pariwisata Dasar	30
Pelatihan Pariwisata Menengah	32
Pelatihan Ekonomi Kreatif Dasar	34
Pelatihan Monitoring Dan Evaluasi	35
Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	36
Pelatihan <i>Public Speaking</i>	37
Pelatihan ESQ	38



PENGUATAN KELEMBAGAAN

<i>Training Of Trainer</i>	
Pelatihan Pariwisata Dasar	40
<i>Training Of Trainer</i>	41
Pelatihan Pariwisata Menengah	41
<i>Training Of Trainer</i>	
Pelatihan Ekonomi Kreatif Dasar	42
Workshop Penyusunan Kurikulum Dan Modul	
Pelatihan Ekonomi Kreatif Menengah	43
Workshop Penyusunan Kurikulum Dan Modul	
Pelatihan Ekonomi Kreatif Lanjutan	44
Workshop Penyusunan Kurikulum Dan Modul	
Pelatihan Pariwisata Lanjutan	45
Workshop Penyusunan Kurikulum Dan Modul	
Pelatihan Pariwisata Dekon	46

TIM PENYUSUN

iv



MANAJERIAL



2022

Program Pelatihan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK I

Tanggal Pelatihan	: 05 Apr s.d 02 Sep 2022 12 Jul s.d 18 Nov 2022
Kuota Peserta	: 10 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 221 JP 27 Hari LAN 667 JP 74 Hari Instansi Peserta
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Nasional dan MASN LAN

Latar Belakang

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I diharapkan dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon I yang mampu memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan mampu memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis dalam melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I juga tidak hanya sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin strategis namun juga diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Sehingga dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan

Tujuan

Mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal bagi pejabat struktural Eselon I yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kriteria Peserta

- Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari Atasan Langsung
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Surat Pernyataan Kesiapan
- Memenuhi kriteria yang di persyaratkan dari LAN sesuai dengan Per LAN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional

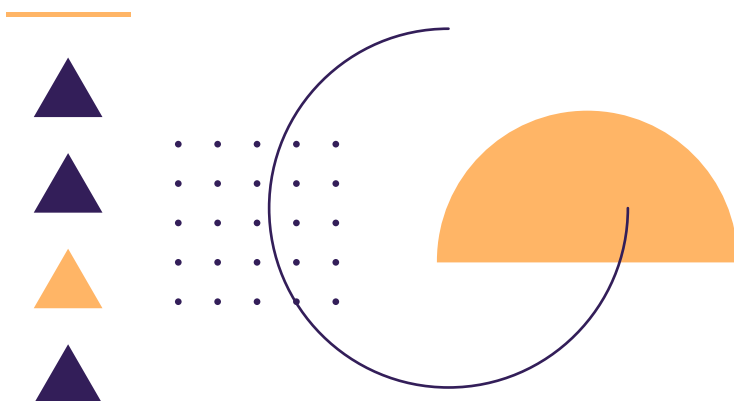
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK I

Indikator Keberhasilan

- Mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin satuan kerjanya.
- Mampu menjabarkan visi dan misi instansi kedalam program-program instansi.
- Mampu melakukan kolaborasi baik secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program
- Mampu melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien
- Mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam mengimplementasikan program di satuan kerjanya.

Materi

- Mengelola diri dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif; dan
 - Etika dan Integritas
- Pengelolaan Kebijakan dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Kerangka Manajemen Kebijakan Publik;
 - Isu Strategis Kebijakan;
 - Komunikasi dan Advokasi Kebijakan;
 - Benchmarking Kebijakan
- Pengelolaan Perubahan Kolaboratif dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Berpikir Holistik
 - Membangun Kolaborasi; dan
 - Kepemimpinan digital.
- Aktualisasi kepemimpinan dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Policy Paper; dan
 - Proyek Perubahan
- Orientasi program mata pelatihan sebagai berikut:
 - Strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
 - Overview kebijakan pelatihan;
 - Review Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan.



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II

Tanggal Pelatihan	: 08 Feb s.d 31 Mei 2022 09 Mei s.d 31 Agu 2022 09 Jun s.d 28 Sep 2022 05 Jul s.d 21 Okt 2022
Kuota Peserta	: 19 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 221 JP 27 Hari 667 JP 74 Hari LAN
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i> Instansi Peserta
Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Nasional dan MASN LAN

Latar Belakang

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II diharapkan dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon II yang mampu memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan mampu memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis dalam melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II juga tidak hanya sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin strategis namun juga diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang inovatif, yaitu penyelenggaraan diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Sehingga dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan

Tujuan

- Meningkatkan Kompetensi Kepemimpinan yang strategis pada pejabat struktural eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan .
- Mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Strategis pada para pejabat dalam merumuskan kebijakan strategis dan kemampuan memengaruhi pejabat struktural dan fungsional dibawahnya termasuk pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan Kebijakan strategis yang telah ditetapkannya

Kriteria Peserta

- Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari atasan langsung
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Surat Pernyataan Kesiediaan
- Memenuhi kriteria yang di persyaratkan dari LAN sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional



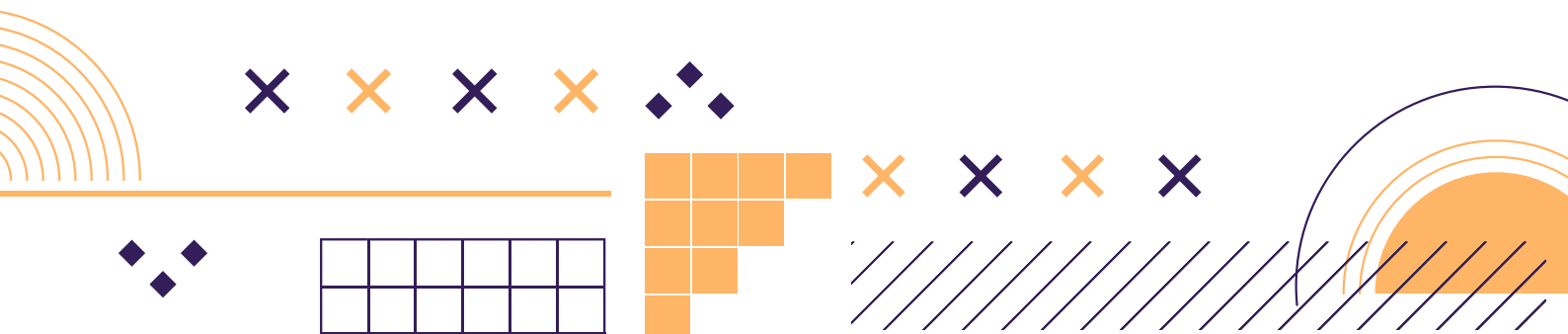
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II

Indikator Keberhasilan

- Mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin satuan kerjanya.
- Mampu menjabarkan visi dan misi instansi kedalam program-program instansi.
- Mampu melakukan kolaborasi baik secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
- Mampu melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien
- Mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam mengimplementasikan program di satuan kerjanya.

Materi

- Mengelola diri dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Energi kepemimpinan; dan
 - Integritas kepemimpinan
- Kepemimpinan strategis dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Kepemimpinan kewirausahaan; dan
 - Organisasi pembelajaran.
- Manajemen strategis dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Dialog strategis;
 - Isu strategis; dan
 - Marketing sektor publik
- Aktualisasi kepemimpinan dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 - Visitasi agenda pembelajaran;
 - Visitasi kepemimpinan nasional; dan
 - Proyek perubahan.
- Orientasi program mata pelatihan sebagai berikut:
 - Strategi kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
 - Overview kebijakan pelatihan;
 - Dinamika kelompok; dan
 - Kebijakan dan tindak lanjut hasil pelatihan



PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Tanggal Pelatihan : 07 Mar s.d 25 Jun 2022
09 Mei s.d 29 Jul 2022
13 Jun s.d 10 Sep 2022
18 Jul s.d 07 Okt 2022
22 Agt s.d 12 Nov 2022

Kuota Peserta : 191 Peserta

Jumlah Jam Pelatihan : 288 JP 33 Hari LAN
853 JP 80 Hari Instansi Peserta

Metode Pelatihan : Daring

Penyelenggara : Pusat Pengembangan
Kompetensi Pimpinan Nasional
dan MASN LAN



Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, sebelum ditetapkan statusnya menjadi PNS maka perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam bentuk latihan dasar calon pegawai negeri sipil (Latsar CPNS).

Latsar CPNS bertujuan untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan bidang tugas serta organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat

Tujuan

Guna mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas



PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Kriteria Peserta

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat dan sudah dapat surat penetapan dari BKN
- b. Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari Atasan Langsung
- c. Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- d. Surat Pernyataan Kesediaan
- e. Memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dari LAN sesuai dengan Per LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Indikator Keberhasilan

- a. Mampu membentuk karakter PNS dalam memenuhi kompetensi administratif kurikulum berupa keterampilan yang bersifat umum atau administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- b. Mampu membentuk karakter PNS dalam memenuhi kompetensi teknis substantif kurikulum berupa keterampilan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas atau pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan formasi jabatannya.

Materi

- a. Sikap Perilaku Bela Negara dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
 2. Analisis Isu Kontemporer
 3. Kesiapsiagaan Bela Negara
- b. Nilai Dasar PNS dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 1. Berorientasi Pelayanan
 2. Akuntabel
 3. Kompeten
 4. Harmonis
 5. Loyal
 6. Adaptif
 7. Kolaboratif
- c. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 1. Manajemen ASN
 2. Pelayanan Publik
 3. *Whole of Government*
- d. Habitulasi dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 1. Konsep Aktualisasi
 2. Proyek perubahan.
 3. Penjelasan Aktualisasi
 4. Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi
 5. Evaluasi Rancangan Aktualisasi
 6. Pembekalan Habitulasi
 7. Aktualisasi di Tempat Kerja
 8. Persiapan Evaluasi Aktualisasi
 9. Evaluasi Aktualisasi
- e. Orientasi dengan mata pelatihan sebagai berikut:
 1. *Overview* kebijakan penyelenggaraan kebijakan
 2. Dinamika Kelompok
 3. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-nilai ASN
 4. Muatan Teknis Substansial Lembaga (MTSL)
 5. Riviui Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

Program Pelatihan

FUNGSIONAL



PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN

Tanggal Pelatihan	: 18 Mei s.d 10 Jun 2022 23 Mei s.d 15 Jun 2022
Kuota Peserta	: 2 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 168 JP
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN

Latar Belakang

Kebijakan publik menjadi instrument bagi negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintah di bentuk sebagai respon terhadap tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan ASN yang mampu menyusun kebijakan publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Untuk mempersiapkan, membentuk dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, dipandang perlu memberikan pelatihan fungsional dan teknis kepada calon analis kebijakan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara professional.

Tujuan

- Memahami pengetahuan dan ketrampilan cakupan studi kebijakan publik
- Memiliki kemampuan dan pemahaman konsepsi analisis kebijakan
- Meningkatkan kemampuan dalam mendokumentasikan saran kebijakan

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari atasan langsung
- Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan
- Berijazah paling rendah S-1/D-IV
- Golongan III-A s.d III-B
- Nilai SKP bernilai BAIK dalam satu tahun terakhir
- Berusaha maksimal 50 tahun

Indikator Keberhasilan

- Mampu mengidentifikasi permasalahan publik dan jenis kebijakan
- Mampu menjelaskan berbagai metodologi dan instrument penelitian/kajian
- Mampu melakukan analisis pemangku kepentingan dalam proses kebijakan
- Mampu mengalisis opsi kebijakan
- Mampu menyusun saran kebijakan
- Mampu melakukan konsultasi publik dan menyusun rancangan konsultasi publik.
- Mampu menyusun hasil observasi dan presensi secara efektif

Materi

- Konsep dan Studi Kebijakan Publik
- Metodologi Kajian/Penelitian
- Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Mapping*)
- Analisis Kebijakan Publik
- Dokumentasi Saran Kebijakan
- Konsultansi Publik
- Advokasi dalam Kebijakan Publik
- Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan
- Penyusunan DUPAK JFAK
- Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan

PELATIHAN KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN

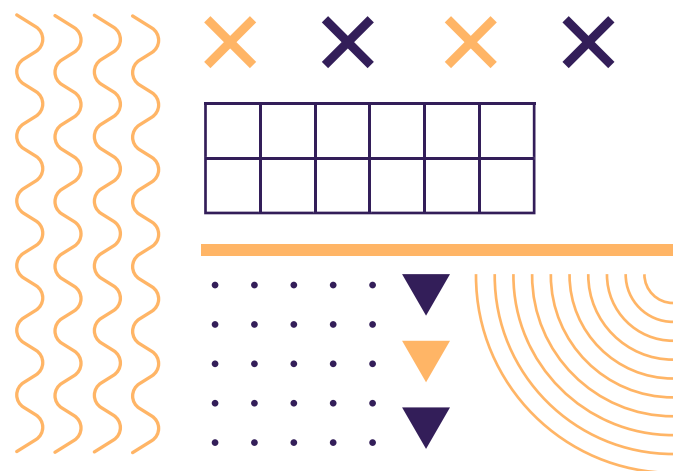
Tanggal Pelatihan	: 23 Mei s.d 17 Jun 2022
Kuota Peserta	: 66 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 102 JP
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN

Latar Belakang

Analisis Kebijakan (AK) merupakan jabatan fungsional tertentu yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan. Kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui penyesuaian/inpassing pada instansi pusat / instansi daerah merupakan salah satu upaya pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional. Profesi ini menuntut kompetensi tertentu sehingga perlu adanya pelatihan khusus bagi analisis kebijakan yang diangkat melalui proses inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain sehingga mampu melakukan tugasnya sebagai analisis kebijakan.

Tujuan

- Memahami pengetahuan tentang substansi kebijakan publik
- Memahami metode riset
- Memahami teknis dan analisis kebijakan
- Memiliki kemampuan menulis dan publikasi
- Memahami tata cara penyusunan saran kebijakan



Materi

- Konsep dan Studi Kebijakan Publik
- Analisis Kebijakan Publik
- Dokumentasi Saran Kebijakan
- Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan
- Penyusunan DUPAK JFAK
- Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan

Kriteria Peserta

- Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dari penyetaraan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari atasan langsung
- Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan
- Berijazah paling rendah S-1/D-IV
- Golongan III-A s.d III-B
- Nilai SKP bernilai BAIK dalam satu tahun terakhir
- Berusia maksimal 50 tahun

Indikator Keberhasilan

- Mampu mengidentifikasi permasalahan publik dan jenis kebijakan
- Memahami dan mampu menjelaskan konsepsi analisis kebijakan publik
- Mampu menganalisis opsi kebijakan
- Memahami peran dan bentuk saran kebijakan
- Memahami dan menguasai tata cara menyusun karya ilmiah



PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA

Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 76 Ayat (1.e); (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pasal Pasal 16 Ayat (1.e) dan Pasal 16 Ayat (2); serta (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 14 huruf (e), dapat disampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak lagi menjadi syarat untuk menduduki jabatan fungsional.

Namun demikian, pelatihan fungsional perencana ahli pertama dan uji kompetensinya merupakan persyaratan untuk naik jenjang jabatan ke perencana ahli muda

Sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 13, Ayat (8), bahwa Perencana yang telah diangkat pertama kali sebagai Perencana Ahli Pertama paling lama 3 (tiga) tahun, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan perencana. Untuk itu, bagi PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi, diwajibkan mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

Tanggal Pelatihan	: April - November 2022
Kuota Peserta	: 2 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 336 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/ Bappenas

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas c.q. Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JFP pada tahun 2022 akan menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama yang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

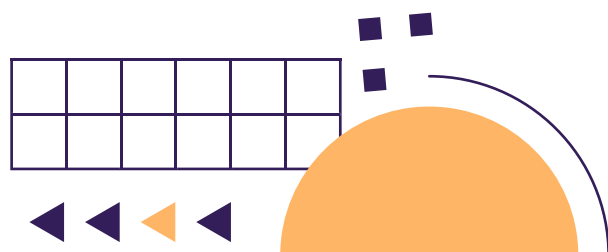
Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan teknis perencanaan pembangunan, perencanaan spesifik: ekonomi, sosial, dan spasial, dan perilaku profesi perencana

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional Perencana Pertama secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional Perencana Pertama

Indikator Keberhasilan

Peserta mampu melaksanakan dan menyusun dokumen Perencanaan





PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA

Kriteria Peserta

- a. PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- b. Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- c. Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 dan pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa; serta akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana
- e. Telah disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon III untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama, dan ditugaskan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan sekurang-kurangnya Eselon II;
- f. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana”

Materi

- a. Analisis Wilayah dan Daerah:
 1. Pertumbuhan, Pemerataan dan Kemiskinan
 2. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah
 3. Sumber Dana dan Pembiayaan Pemerintah
 4. Perdagangan dalam Pembangunan
 5. Teknik dan Metode – Metode Analisis Daerah
 - b. Administrasi dan Manajemen Publik:
 1. Pengantar Manajemen Pembangunan
 2. Lingkungan Kelembagaan
 3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 4. Dasar-dasar Penganggaran
 - c. Perencanaan Spasial:
 1. Ruang Sebagai Sumber Daya Wilayah dan Kota
 2. Rencana Spasial Kota dan Wilayah
 - d. Konsep dan Teknik Perencanaan:
 1. Konsep Dasar Perencanaan
 2. Perencanaan dan Pembangunan
 3. Perencanaan Sektoral
 4. Perencanaan Daerah dan Pengembangan Wilayah
 5. Perencanaan Proyek
 6. Analisis Dampak Pembangunan
 7. Pengumpulan Data dan Informasi
 - e. Studi Kasus
 - f. Topik Khusus
 - g. Latihan Perencanaan
 - h. Sikap/*Affective*
 - i. Uji Kompetensi
- 



PELATIHAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA



Tanggal Pelatihan	: 27 Jun - 30 Sep 2022
Kuota Peserta	: 10 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 104 JP Daring 410 JP OJT
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengelolaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendasarkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, dirasa perlu untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya untuk Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Muda

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mempraktekkan materi yang terdapat pada Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP, Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Mengelola Kontrak PBJP, dan Mengelola PBJP secara Swakelola pada level 3 sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda

Kriteria Peserta

- JF PPBJ Muda;
- Pendidikan minimal S1/D4 dan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- Mempunyai sertifikat Pelatihan Pembentukan PBJP, kecuali bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional PBJ melalui penyesuaian atau inpassing atau perpindahan dari jabatan lain

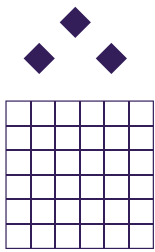
Materi

- Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 3;
- Jenis Kompetensi Memilih Penyedia PBJP Level 3;
- Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 3;
- Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 3

Indikator Keberhasilan

- Melakukan penyusunan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan perkiraan harga untuk pekerjaan tidak kompleks, serta merumuskan pemaketan dan cara pengadaan;
- Melakukan reviu terhadap dokumen persiapan PBJP dan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dengan proses PBJ yang tidak sederhana;
- Merumuskan kontrak PBJP dalam bentuk yang tidak sederhana dan melakukan pengendalian kontrak untuk pekerjaan PBJP yang tidak kompleks; dan
- Melakukan analisis dan memecahkan masalah teknis operasional pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PBJP secara Swakelola.

PELATIHAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA



Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengelolaan pegawai negeri sipil dilakukan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendasarkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, dirasa perlu untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya untuk Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Madya

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat melakukan unit kompetensi yang terdapat pada unit kompetensi yang ada pada jenjang madya

Kriteria Peserta

- JF PPBJ Madya;
- Pendidikan minimal S1/D4 dan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
- Mempunyai sertifikat Pelatihan Pembentukan PBJP, kecuali bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional PBJ melalui penyesuaian atau inpassing atau perpindahan dari jabatan lain

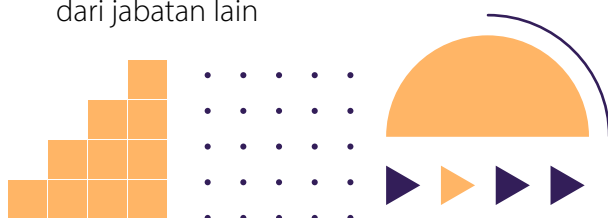
Tanggal Pelatihan	: 04 Apr - 05 Agt 2022
Kuota Peserta	: 3 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 62 JP Daring 610 JP OJT
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Materi

- Menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa;
- Menyelaraskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- Merumusan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Menyusun kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- Melakukan Pengelolaan Kinerja

Indikator Keberhasilan

- Mampu memahami tata cara menelaah Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mampu memahami tata cara menyelaraskan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mampu memahami tata cara merumusan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Mampu memahami tata cara penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- Mampu memahami tata cara pembentukan Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- Mampu memahami tata cara melakukan Pengelolaan Kinerja



PELATIHAN FUNGSIONAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Tanggal Pelatihan	: Tentatif mengikuti jadwal BPSDM Kementerian Hukum dan HAM
Kuota Peserta	: 2 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 768 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Latar Belakang

Pelatihan ini merupakan sebuah kegiatan pengembangan kompetensi untuk para peserta sebagai bentuk pemenuhan penguasaan substantif di bidang penyusunan dan perumusan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Hal ini dilatarbelakangi perlunya ada pemahaman dalam tata cara perancangan Peraturan-Undang yang harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal

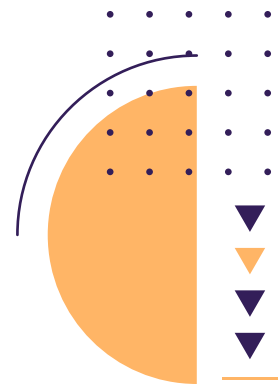
Indikator Keberhasilan

- Mampu menyusun naskah akademis dan atau kajian teknis dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-Undang;
- Memahami Teori dan Asas Hukum Perjanjian, Bentuk, Macam, Jenis, dan Syarat Sahnya Perjanjian Serta Akibat Hukum Bagi Para Pihak dan Pihak Terkait;

Tujuan

- Memberikan pemahaman dan kemampuan dasar akan teori, asas, dan kaidah legal drafting dalam penyusunan peraturan sesuai dengan kaidah legal drafting;
- Memberikan pemahaman dan kemampuan dalam proses penyusunan perjanjian/kontrak yang dibuat menjadi sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan;
- Meminimalkan risiko hukum baik yang akan berimplikasi secara finansial, sosial, dan ekonomi, dan memiliki keterampilan menyusun dalam strategi, metode;
- Meningkatkan kemampuan dalam bernegosiasi, menyusun perjanjian/kontrak, dan mereview kontrak;
- Memiliki keterampilan menyusun strategi, metode, dan teknik dalam bernegosiasi, menyusun perjanjian/kontrak, mereview kontrak, dan penanganan perselisihan yang timbul akibat perjanjian/kontrak antara para pihak;
- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga fungsional (legal drafter) dalam melakukan perancangan Peraturan Perundang-Undang;
- Menunjang terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang

PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

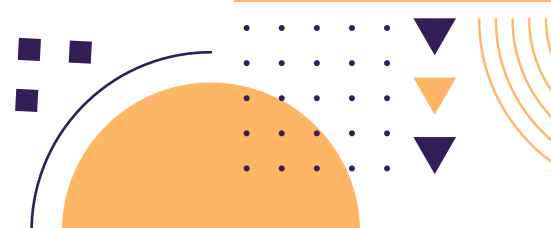
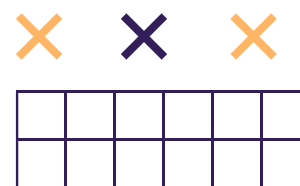


Kriteria Peserta

- Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan atau Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- Ditugaskan oleh pejabat yang berwenang pada instansi asal peserta;
- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
- Memiliki surat persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja;
- Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisasi
- Prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja pegawai terakhir dengan nilai rata-rata paling sedikit baik
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan.
- Berusia paling tinggi 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun

Materi

- Dinamika Kelompok
- Jenjang Karir Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- Etika Perancang Peraturan Perundang-Undangan
- Ilmu Perundang-Undangan
- Dasar-Dasar Konstitusional
- Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
- Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Naskah Akademik
- Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Proses Penyusunan Peraturan Daerah
- Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Bahasa Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) dan Penetapan
- Pengujian Materi Peraturan Perundang-Undangan
- Aspek hak asasi manusia dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Magang:
- Peranan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional
- Masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum
- Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Komunikasi, Negosiasi, dan Aktualisasi Diri
- Pengarahan Kediklatan
- Penjelasan Program
- Jam Pimpinan
- Jam Mandiri



PELATIHAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TINGKAT AHLI

Tanggal Pelatihan	: Tentatif mengikuti jadwal Pusdiklat Kominfo
Kuota Peserta	: 4 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 180 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo

Latar Belakang

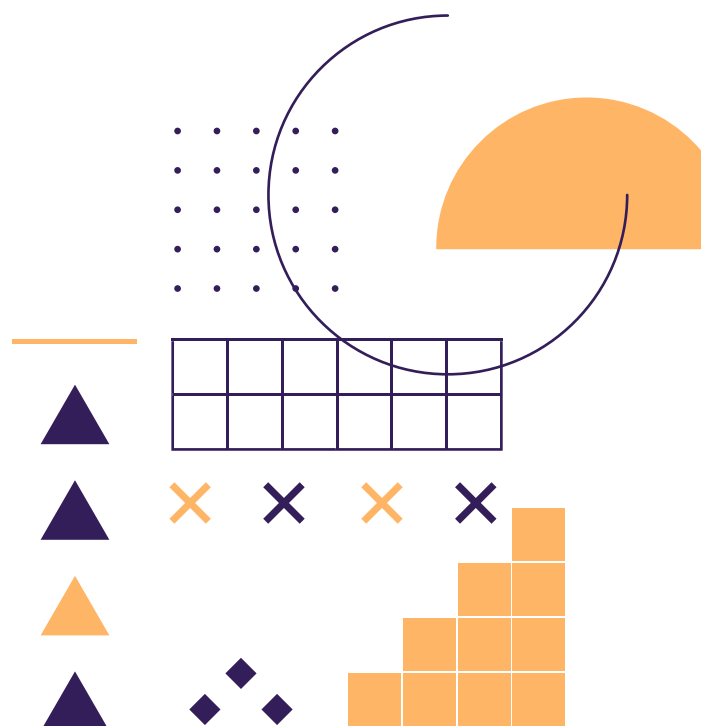
Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pranata humas pada institusi pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan

Tujuan

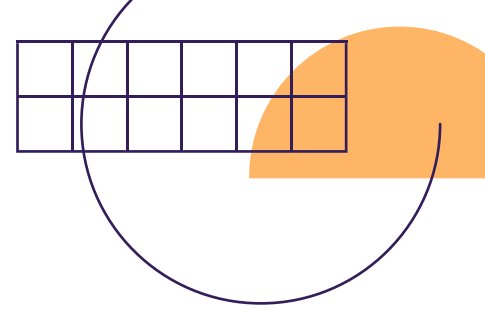
- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam kegiatan pelayanan informasi kehumasan
- Meningkatkan profesionalisme pranata humas

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (DIV)
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan



PELATIHAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TINGKAT AHLI



Indikator Keberhasilan

- a. Memahami muatan teknis substansi lembaga
- b. Memahami Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian
- c. Memahami dan menerapkan etika kehumasan
- d. Memahami konteks makro kehumasan
- e. Memahami dan menerapkan komunikasi efektif
- f. Memahami dan menerapkan manajemen kehumasan pemerintah
- g. Memahami dan menerapkan strategi pengelolaan isu kebijakan pemerintah
- h. Memahami dan menerapkan tata cara diplomasi publik
- i. Memahami dan menerapkan manajemen komunikasi program pemerintah
- j. Memahami dan mengetahui audit komunikasi pemerintah
- k. Mengetahui tata cara penulisan ilmiah
- l. Mengetahui tata cara penulisan dan penyuntingan naskah kehumasan
- m. Memahami dan menerapkan tata cara manajemen media kehumasan pemerintah
- n. Mengetahui dan memahami *Cyber Public Relation*
- o. Mengetahui dan memahami *Public Speaking*
- p. Memahami dan menerapkan tata cara manajemen event
- q. Memahami dan menerapkan tata cara penghitungan angka kredit pranata humas tingkat keahlian
- r. Memahami dan mampu membangun dinamika kelompok
- s. Memahami dan menerapkan pengembangan kepribadian
- t. Memahami tata cara penyusunan laporan observasi lapangan
- u. Memahami dan mampu melaksanakan seminar kelompok

Materi

- a. Muatan Dasar:
 1. Muatan Teknis Sunstansi Lembaga
 2. Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian
 3. Etika Kehumasan
- b. Muatan Inti:
 1. Konteks makro kehumasan
 2. Komunikasi efektif
 3. Manajemen kehumasan pemerintah
 4. Startegi pengelolaan isu kebijakan pemerintah
 5. Diplomasi politik
 6. Manajemen komunikasi program pemerintah
 7. Audit komunikasi pemerintah
 8. Penulisan ilmiah
 9. Penulisan dan penyuntingan naskah kehumasan
 10. Manajemen media kehumasan pemerintah
 11. *Cyber Public Relation*
 12. *Public Speaking*
 13. Manajemen Event
 14. Penghitungan angka kredit Pranata Humas tingkat keahlian
- c. Muatan Penunjang:
 1. Dinamika Kelompok
 2. Pengembangan Kepribadian
 3. Observasi Lapangan
 4. Seminar Kelompok

PELATIHAN STATISTISI TINGKAT KEAHLIAN

Tanggal Pelatihan	: Tentatif mengikuti jadwal Pusdiklat BPS
Kuota Peserta	: 4 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 81 JP
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS

Latar Belakang

Perlunya pembekalan bagi Pejabat Fungsional Statistisi untuk mampu mengumpulkan angka kredit tertentu agar memenuhi prasyarat kenaikan pangkatnya. Angka kredit dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai proses kegiatan statistisi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengembangan keilmuan profesi statistisi. Hal tersebut diselenggarakan berdasarkan PERMENPANRB No 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Kepala BPS No 27 Tahun 2014 dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan MENPANRB No 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini seorang Pejabat Fungsional Statistisi dapat terus mengembangkan dirinya menjadi lebih profesional serta bermanfaat untuk masyarakat. Dengan demikian perlu diberikan pemahaman mengenai kegiatan pengembangan profesi dan pengetahuan bagi para Pejabat Fungsional Statistisi



Tujuan

Untuk penguatan kompetensi JF Statistisi sehingga memiliki kualifikasi yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang statistik sesuai dengan PERMENPANRB No 19 Tahun 2013, serta Peraturan Bersama Kepala BPS No 27 Tahun 2014 dan Kepala BKN No 1 Tahun 2014.

Indikator Keberhasilan

- Mampu melakukan penyediaan data dan informasi statistik
- Mampu melakukan analisis dan pengembangan statistik
- Mampu melakukan pengembangan profesi statistisi
- Mampu memahami kode etik statistik dalam kegiatan keprofesian
- Mampu menyusun DUPAK Jabatan Fungsional Statistisi

Materi

- Penyediaan data dan informasi statistik
- Analisis dan pengembangan statistik
- Pengembangan profesi statistisi yang meliputi:
 - Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik
 - Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang statistik
 - Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik
- Kode etik statistik:
- Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai JF Ahli Pertama
- Diusulkan oleh pejabat setingkat eselon II.
- Berijazah minimal D4/S1 jurusan Statistik maupun Non Statistik sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh BPS.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan



PELATIHAN PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL

Tanggal Pelatihan : Tentatif mengikuti jadwal Pusediklat BPS
Kuota Peserta : 3 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan : 104 JP
Metode Pelatihan : *Blended Learning*
Penyelenggara : Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS

Latar Belakang

Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil, yaitu diklat yang ditujukan bagi PNS yang bekerja di bidang teknologi informasi dan akan memangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer jenjang Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pranata Komputer Pelaksana, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan dan Pranata Komputer Penyelia

Tujuan

Terpenuhinya kompetensi di bidang teknologi informasi bagi PNS yang sesuai dengan persyaratan dalam jabatan fungsional pranata komputer

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Diusulkan oleh pejabat setingkat eselon II.
- Berijazah minimal SLTA
- Pangkat serendah-rendahnya II.A
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara profesional.
- Memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- Mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
- Mampu memberi saran-saran untuk meningkatkan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Materi

- Sistem penilaian dan administrasi Pranata Komputer
- Pengenalan teknologi komputer
- Perekaman data
- Pemrograman
- Deteksi dan perbaikan sistem komputer dan jaringan
- Pengenalan aplikasi khusus
- Etika dan pengembangan profesi komputer
- Pembuatan dokumentasi dan laporan

PELATIHAN PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

Tanggal Pelatihan	: Tentatif mengikuti jadwal Pusdiklat BPS
Kuota Peserta	: 4 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 208 JP
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS

Latar Belakang

Peranan pranata komputer menjadi tolak ukur pemerintah dalam menangani layanan berbasis teknologi informasi. Maka dari itu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, para pejabat fungsional dapat menaikkan jabatan mengacu pada angka kredit. Berdasarkan persoalan tersebut jelas bahwa karier para pejabat fungsional pranata komputer sangat berpengaruh dari hasil pencapaian kinerja nilai angka kredit yang didapat. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan JFPK, seseorang yang ingin menduduki JFPK harus mengikuti Diklat yang sesuai dengan tingkatannya untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan

Materi

- Sistem penilaian dan administrasi pranata komputer
- Pengenalan teknologi informasi
- Rekayasa sistem informasi
- Analisis sistem informasi
- Perancangan sistem informasi
- Implementasi sistem
- Administrasi dan pengelolaan database
- Administrasi dan pengelolaan jaringan komputer
- Etika dan pengembangan profesi komputer
- Pembuatan dokumentasi dan laporan

Tujuan

Terpenuhinya kompetensi di bidang teknologi informasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan persyaratan dalam JFPK serta meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional pranata komputer tingkat ahli dengan design pembelajaran yang mengkombinasikan pendekatan *asynchronous*, mandiri, *asynchronous* kolaboratif dan *synchronous* maya untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu diklat ini untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan sesuai hasil AKP Jabatan

Indikator Keberhasilan

- Memahami administrasi dan sistem penilaian pranata komputer
- Mampu melakukan perencanaan, analisis sistem dan rekayasa sistem informasi
- Mampu mengadministrasi dan mengelola database dan jaringan komputer
- Mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
- Mampu memberi saran-saran untuk meningkatkan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- Mampu menyusun dokumentasi dan laporan terkait jabatan pranata komputer

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai JF Pranata Komputer tingkat Ahli.
- Diusulkan oleh pejabat setingkat eselon III
- Berijazah minimal D4/S1 (diutamakan Non TI)
- Pangkat serendah-rendahnya IIIa
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan

PELATIHAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL

Tanggal Pelatihan : 18 Jul - 26 Agt 2022
Kuota Peserta : 2 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan : 208 JP Daring
360 JP Magang
Metode Pelatihan : *Blended Learning*
Penyelenggara : Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI

Latar Belakang

Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut melaksanakan penyelenggaraan kearsipan berupa pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan sampai kepada fase pengelolaan statisnya. Oleh karena itu, Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Kategori Terampil dibutuhkan guna memberikan bekal bagi PNS di bidang kearsipan. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan, terampil dan sikap dalam memangku jabatannya selaku Pejabat Fungsional Arsiparis

Tujuan

Mengetahui hal-hal mengenai kearsipan berupa pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan sampai kepada fase pengelolaan statisnya

Indikator Keberhasilan

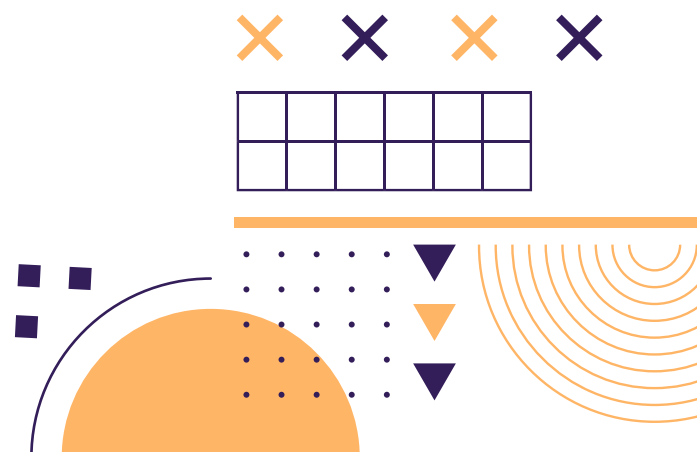
- Memahami pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis
- Memahami tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pengelolaan statis arsip
- Mampu mengaktualisasikan pengelolaan arsip pada instansi masing-masing

Kriteria Peserta

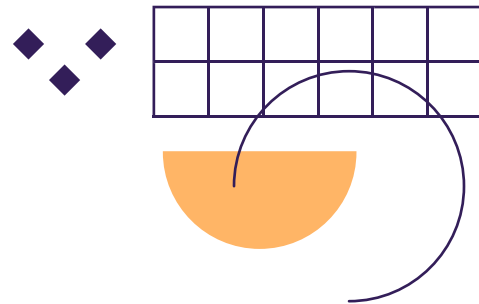
- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai JF Arsiparis Terampil
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Usia pada saat pembukaan diklat maksimal 53 atau 55 tahun bagi peserta yang sudah melalui proses inpassing

Materi

- Arsip Dinamis
- Arsip Statis
- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip
- Pengelolaan Arsip Statis
- Magang



PELATIHAN ARSIPARIS TINGKAT KEAHLIAN



Tanggal Pelatihan	: 30 Mei - 13 Jun 2022 08 Agt - 21 Sep 2022
Kuota Peserta	: 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 100 JP Daring 75 JP Magang
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat ANRI

Latar Belakang

Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut melaksanakan penyelenggaraan kearsipanberupapengelolaanarsipbaikarsipdinamis maupun arsip statis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan sampai kepada fase pengelolaan statisnya. Oleh karena itu, Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Kategori Tingkat Terampil Ke Arsiparis Tingkat Ahli dibutuhkan guna memberikan bekal bagi PNS di bidang kearsipan. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan, terampil dan sikap dalam memangku jabatannya selaku Pejabat Fungsional Arsiparis

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi arsiparis, untuk kenaikan jenjang karier dari jabatan fungsional arsiparis tingkat terampil ke arsiparis tingkat ahli. Mempelajari kearsipan mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan serta pengelolaan arsip statis. Selain itu, mempelajari tentang teori dan filsafat kearsipan serta metodologi dan teknik penulisan ilmiah yang dapat membantu dalam pembuatan penulisan karya ilmiah

Materi

- Ceramah Kebijakan Kearsipan Nasional
- Ceramah Pengantar Kearsipan
- Penyusun Program Pengelolaan Arsip Elektronik
- Penerapan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Yang Terintegrasi Bidang Kearsipan
- Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan
- Pengenalan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis : Srikandi
- Penyediaan Akses Arsip dalam rangka Layanan Kearsipan Kepada Masyarakat Melalui SIKN & JIKN
- Manajemen Layanan SPBE
- Pengamanan dan Autentifikasi Arsip
- Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Magang

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai JF Arsiparis Tingkat Ahli
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Usia pada saat pembukaan diklat maksimal 53 atau 55 tahun bagi peserta yang sudah melalui proses inpassing

Indikator Keberhasilan

- Memahami pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis
- Memahami tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pengelolaan statis arsip
- Mampu mengaktualisasikan pengelolaan arsip pada instansi masing-masing



Program
Pelatihan

TEKNIS PENUNJANG FUNGSIONAL



PELATIHAN *POLICY BRIEF, POLICY PAPER, POLICY MEMO, DAN REGULATORY IMPACT OF ASSESSMENT (RIA)*



Tanggal Pelatihan	: 18 - 20 Mei 2021
Kuota Peserta	: 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 29 JP
Metode Pelatihan	: Luring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

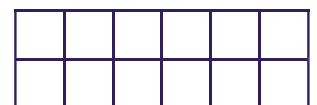
Latar Belakang

Dinamika organisasi terutama dimasa pemerintahan saat ini terjadi semakin cepat seiring dengan tuntutan yang tertuang dalam program-program percepatan pembangunan yang diusung oleh pemerintah. Kondisi tersebut menghendaki adanya respon cepat dari organisasi. Untuk itu komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi menjadi salah satu dimensi penting bagi organisasi untuk mengikuti dinamika perkembangan yang ada.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan pelatihan *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)*, dan *Advokasi Kebijakan*, pelatihan ini diadakan untuk menilai kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai

Tujuan

- Mampu menjelaskan proses kebijakan serta bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan.
- Mampu mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan.
- Mampu mengidentifikasi masalah kebijakan yang berimplikasi terhadap desain dan implementasi kebijakan.
- Mampu menyusun hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.
- Memahami dan mampu mengimplementasikan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam memformulasikan peraturan per undang-undangan.
- Memberikan pengetahuan dan keterampilan komunikasi persuasif kepada para peserta, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan



PELATIHAN *POLICY BRIEF, POLICY PAPER, POLICY MEMO, DAN REGULATORY IMPACT OF ASSESSMENT (RIA)*

Kriteria Peserta

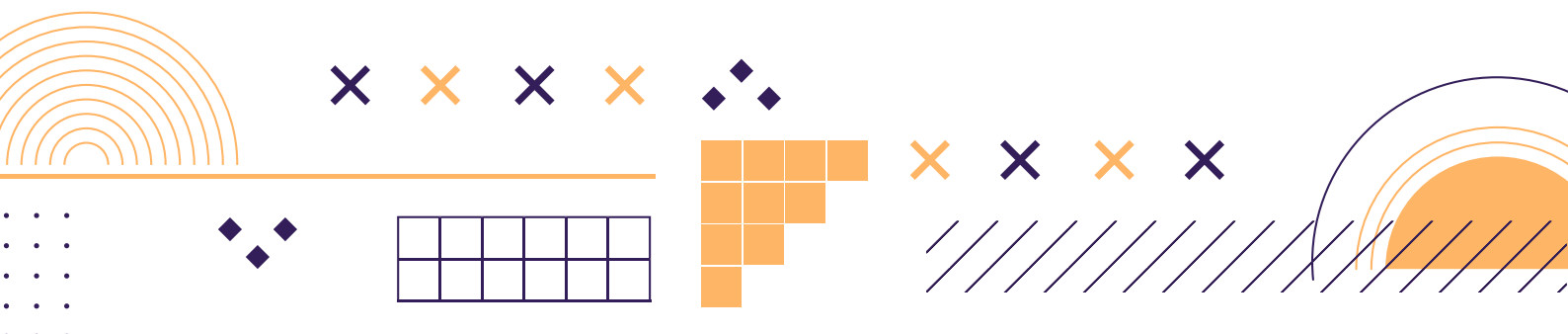
- Para Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki;
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja;
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Indikator Keberhasilan

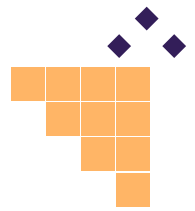
- Mampu menjelaskan bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan.
- Mampu mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan.
- Mampu mengidentifikasi masalah kebijakan.
- Mampu mengimplementasikan terhadap desain dan perilaku kebijakan.
- Mampu menjelaskan hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.
- Mampu mengimplementasikan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* untuk memformulasikan peraturan dan regulasi pemerintah

Materi

- Materi Teknis Substansi Lembaga
- Building Learning Commitment*
- Prinsip-prinsip dasar kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- Kebijakan-Kebijakan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Isu dibalik Kebijakan Publik bidang Kepariwisataan
- Kiat-kiat Menulis *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan Advokasi Kebijakan
- Teknik Menulis *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan Advokasi Kebijakan
- Pembahasan Isu-isu yang akan diangkat dalam Praktik Penulisan *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan Advokasi Kebijakan
- Praktik menulis *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan Advokasi Kebijakan berdasarkan ISU
- Ujian komprehensif hasil praktik menulis *Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan Advokasi Kebijakan berdasarkan Isu



PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN ASN



Latar Belakang

Untuk mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan ASN dalam melaksanakan program pelayanan kepegawaian perlu dibangun sistem penjaminan kompetensi bagi ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Upaya ini dicapai melalui sistem pengembangan dan pemeliharaan kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian dan penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan pelatihan teknis kompetensi manajemen ASN berbasis kompetensi yang ditandai dengan kurikulum dan modul disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan pengelola kepegawaian sesuai dengan jenjangnya. Selain itu, untuk menjamin profesionalisme penyelenggara manajemen ASN perlu dipastikan kompetensinya melalui sistem sertifikasi manajemen ASN. Sistem sertifikasi kompetensi ini sebagai bukti formal penguasaan kompetensi teknis manajemen ASN bagi setiap pengelola ASN. Kompetensi teknis tersebut sebagai pernyataan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kewenangan jabatannya, sekaligus mewujudkan pelayanan kepegawaian yang akuntabel

Tujuan

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN diselenggarakan untuk memenuhi kompetensi manajemen ASN melalui pelatihan manajemen ASN dan uji kompetensi

Indikator Keberhasilan

- Peningkatan kinerja pengelola kepegawaian
- Peningkatan kinerja organisasi
- Terlatihnya kemampuan atasan langsung mengimplemetasikan coaching dan mentoring kepada bawahannya

Tanggal Pelatihan	:	<ul style="list-style-type: none">06 - 09 Jun 2022 12 Jul 202213 - 16 Jun 2022 13 Jul 202204 - 07 Jul 2022 03 Agt 202211 -14 Jul 2022 04 Agt 202218 - 21 Jul 2022 25 Agt 202201 - 04 Agt 2022 07 Sep 202229 Agt - 01 Sep 2022 03 Okt 202219 - 22 Sep 2022 25 Okt 2022
Kuota Peserta	:	5 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	:	32 JP
Metode Pelatihan	:	Daring
Penyelenggara	:	Pusat Pengembangan ASN BKN

Kriteria Peserta

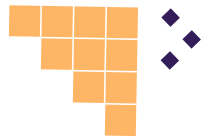
- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian/Analis SDM Aparatur
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Pejabat Administrator/JFK Madya
- JFK inpassing sesuai dengan levelnya

Materi

- Mengelola diri dengan mata pelatihan sebagai
- Manajemen rencana PNS
- Manajemen pengadaan PNS
- Manajemen pengembangan kompetensi PNS
- Manajemen penilaian kompetensi ASN
- Manajemen kinerja
- Manajemen kompensasi dan kesejahteraan ASN
- Manajemen disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
- Manajemen pengembangan karier PNS



PELATIHAN FASILITATOR DARING



Tanggal Pelatihan	: 14 - 17 Maret 2021 13 - 16 Juni 2022
Kuota Peserta	: 4 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 35 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN

Latar Belakang

Fasilitator Daring diperlukan karena setiap orang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengetahui kemampuan Fasilitator Daring, kita dapat menjalin interaksi tersebut dengan lebih baik. Dalam konteks dunia kerja, arus komunikasi antara atasan, bawahan, dan sesama rekan sekerja (peer) bahkan dengan pihak lain yang terkait dalam kegiatan suatu pekerjaan akan sangat berdampak pada kinerja semua unsur yang ada di lingkungan dunia kerja tersebut. Oleh karena itu, siapa pun yang memasuki dunia kerja harus menyadari dan memahami pentingnya efektivitas komunikasi dalam menjalin hubungan yang sehat di lingkungan tempatnya bekerja termasuk PNS. Menyadari pentingnya kemampuan Fasilitator Daring bagi PNS di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf tersebut, PPSDM Parekraf akan melaksanakan pelatihan ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten

Tujuan

Melalui pelatihan Fasilitator Daring ini, diharapkan peserta dapat Menyusun materi pelatihan daring (dalam jaringan) dalam bentuk video pembelajaran sesuai dengan mata pelatihan yang diampu dengan teknik presentasi visual yang baik

Kriteria Peserta

- PNS yang bertugas sebagai tenaga pelatihan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Mampu menjelaskan teknik presentasi verbal dan visual.
- Mampu menjelaskan teknik penyusunan skrip (script) video
- Mampu menjelaskan teknik pembuatan video pembelajaran *e-learning*
- Mampu membuat video pembelajaran elearning
- Mampu mendemonstrasikan presentasi video pembimbingan klinis (*coaching clinic*)

Materi

- Pembukaan dan Ceramah **Overview** Pengembangan Kompetensi Berbasis *E-learning*;
- Membangun Persepsi Pelatihan Fasilitator Daring: *Overview* Program Pelatihan Fasilitator Daring;
- Membangun Persepsi Pelatihan Fasilitator Daring: *Building Learning Commitment*;
- Teknik Presentasi Verbal dan Visual yang Efektif;
- Teknik Penyusunan Script Vidio Pembelajaran;
- Teknik Pembuatan Vidio Pembelajaran;
- Praktek Pembuatan Vidio Pembelajaran;
- Presentasi Vidio Pembelajaran dan Pembimbingan Klinis;
- Reviu Kebijakan dan TL Program Pelatihan



2022

Program Pelatihan

PPSDM PAREKRAF

TEKNIS



PELATIHAN PARIWISATA DASAR

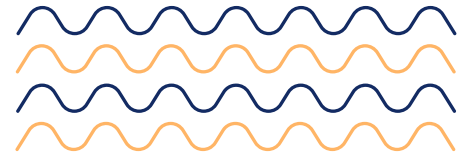
Tanggal Pelatihan : Angkatan I - 07 - 20 Juni 2022 Angkatan IV - 06 - 19 September 2022
Angkatan II - 05 - 18 Juli 2022 Angkatan V - 04 - 17 Oktober 2022
Angkatan III - 02 - 15 Agustus 2022 Angkatan VI - 08 - 21 November 2022

Kuota Peserta : 30 Peserta/Angkatan

Jumlah Jam Pelatihan : 74 JP

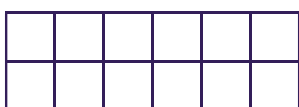
Metode Pelatihan : *Blended Learning*

Penyelenggara : Politeknik Negeri Pariwisata



Latar Belakang

Sebagai Aparatur Pemerintahan yang tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), dan fasilitator, sehingga sebagai ASN yang bekerja di bidang kepariwisataan, dituntut untuk mampu memahami dan memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang kepariwisataan. Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan II, III dan IV tahun anggaran 2021 dirasakan sangat strategis dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN dalam hal kepariwisataan, dan bertujuan guna meningkatkan kemampuan para ASN dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi memahami analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, membangun lembaga penyelenggara pelatihan yang memiliki keunggulan dan mampu melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini juga diharapkan agar tersedianya ASN yang kompeten, profesional, mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan juga dalam peningkatan kinerja organisasi dan akselerasi reformasi birokrasi.



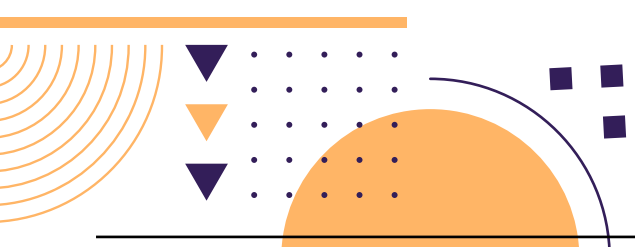
Tujuan

Penyelenggaraan Pelatihan Pariwisata Dasar bertujuan agar Peserta dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam memahami kepariwisataan dan menjadi ASN yang profesional di bidang kepariwisataan



Kriteria Peserta

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang pariwisata atau bekerja di instansi yang membidangi pariwisata.
- Surat Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja.
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan.



PELATIHAN PARIWISATA DASAR

Indikator Keberhasilan

- Kemampuan dalam menguasai konsep pariwisata dasar;
- Kemampuan dalam menguasai sistem kepariwisataan;
- Kemampuan dalam menguasai pengetahuan dasar tentang produk wisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan dan teknologi informasi dalam kepariwisataan



Materi

- Pilar Konsep Dasar Kepariwisata, dengan materi antara lain:
 - Kode Etik Kepariwisata;
 - Pembangunan Kepariwisata Nasional;
 - Dasar Konsep Kepariwisata.
- Pilar Konsep Pengetahuan Industri Pariwisata, yang terdiri dari materi antara lain:
 - Pengetahuan Dasar Industri Hospitalitas;
 - Pengetahuan Dasar Industri Perjalanan;
 - Pengetahuan Dasar Industri Konvensi dan Event; dan
 - Pengetahuan Dasar Daya Tarik Wisata
- Pilar Pengetahuan Dasar Pemasaran Pariwisata dengan materi Dasar – dasar Pemasaran Pariwisata;
- Pilar Pengetahuan Dasar Kelembagaan Pariwisata dengan materi Dasar – dasar Kelembagaan Pariwisata
- Pilar Pengetahuan Teknologi Informasi dengan materi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Kepariwisata;
- Studi lapangan; dan
- Uji Komprehensif



PELATIHAN PARIWISATA MENENGAH

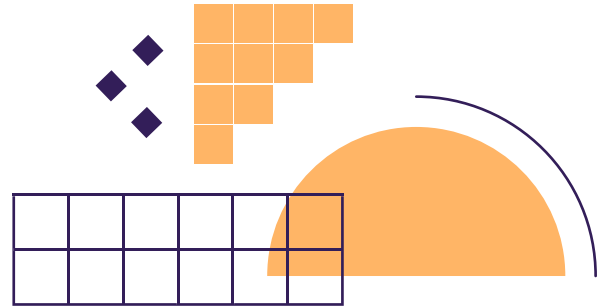
Tanggal Pelatihan : Angkatan I - 22 - 31 Agustus 2022 Angkatan IV - 03 - 12 Oktober 2022
Angkatan II - 12 - 21 September 2022 Angkatan V - 03 - 12 Oktober 2022
Angkatan III - 12 - 21 September 2022 Angkatan VI - 02 - 11 November 2022

Kuota Peserta : 30 Peserta/Angkatan

Jumlah Jam Pelatihan : 63JP

Metode Pelatihan : *Blended Learning*

Penyelenggara : Politeknik Negeri
Pariwisata

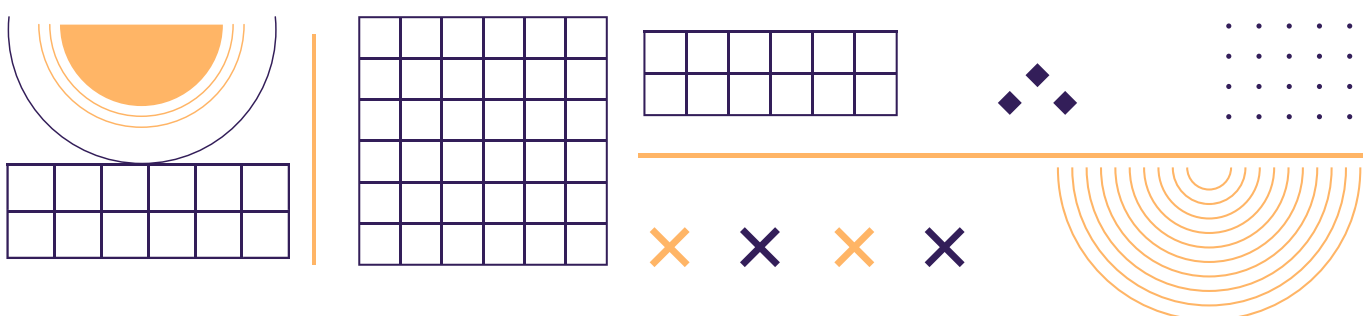


Latar Belakang

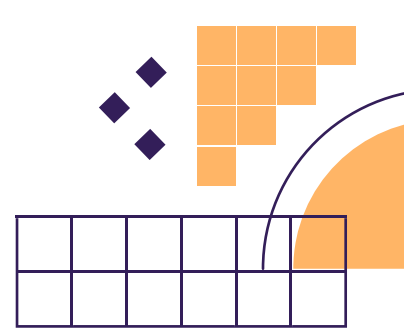
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kepariwisataan menjadi salah satu aspek utama dalam pengembangan pariwisata nasional dan SDM menjadi kunci utama pengembangan pariwisata. Berbagai kajian menunjukkan bahwa salah satu titik lemah pembangunan sektor pariwisata nasional terletak pada kemampuan SDM yang jauh dari memadai, baik untuk menyusun perencanaan pengembangan program kepariwisataan, regulasi, sampai koordinasi lintas sektoral hingga pengelolaan usaha pariwisata. Pariwisata merupakan sebuah industri yang sangat bergantung kepada SDM sebagai elemen utama pemberian pelayanan kepada konsumen. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kesempatan bagi ASN di bidang kepariwisataan, dalam meningkatkan kompetensi bidang kepariwisataannya agar mampu menjadi fasilitator yang kompeten dalam pengelolaan kepariwisataan pada tingkat nasional maupun daerah

Tujuan

- Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
- Surat persetujuan mengikuti pelatihan dari Atasan Langsung
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan
- Surat Pernyataan Kesiapan
- Memenuhi kriteria yang di persyaratkan dari LAN sesuai dengan Per LAN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional



PELATIHAN PARIWISATA MENENGAH



Indikator Keberhasilan

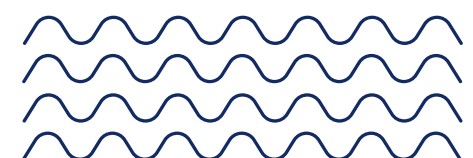
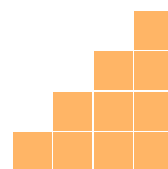
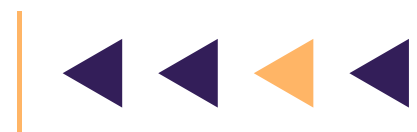
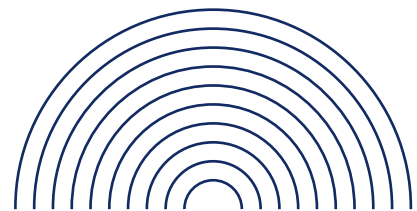
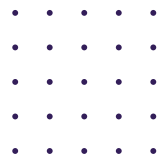
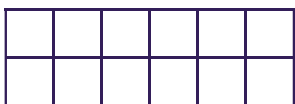
- Tercapainya tujuan pembelajaran pada pilar pengembangan produk pariwisata yaitu penguasaan konsep, isu-isu, dan tren terkini sehingga bisa mengimplementasikannya dalam pencapaian tujuan organisasi
- Tercapainya tujuan pembelajaran pada pilar pengelolaan pemasaran destinasi yaitu peserta memiliki sudut pandang strategis dalam perencanaan dan implikasi keputusan strategis serta memberikan rekomendasi strategis dalam pemasaran pariwisata.
- Tercapainya tujuan pembelajaran pada pilar industri pariwisata yaitu meningkatnya kompetensi peserta terkait standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha dan profesi pariwisata, kontribusi sektor industri pariwisata terhadap pendapatan daerah/negara.
- Tercapainya tujuan pembelajaran pada pilar kelembagaan pariwisata yaitu peserta memahami perspektif, isu-isu dan tren terkini sehingga dapat melakukan analisis dan rekomendasi lebih baik

Kriteria Peserta

- Merupakan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Telah dinyatakan mengikuti dan lulus Pelatihan Pariwisata Tingkat Dasar.
- Diusulkan oleh unit kerjanya.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan.

Materi

- Mengelola diri dengan mata pelatihan sebagai
- Pengembangan produk pariwisata
- Manajemen pemasaran
- Industri pariwisata
- Penguatan kelembagaan pariwisata
- Studi Lapangan



PELATIHAN EKONOMI KREATIF DASAR

Tanggal Pelatihan	: Angkatan I - 15 - 29 Agustus 2022 Angkatan II - 18 - 31 Oktober 2022
Kuota Peserta	: 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 77 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Latar Belakang

Definisi ekonomi kreatif dasar hingga saat ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Kreativitas, yang menjadi unsur vital dalam ekonomi kreatif sendiri masih sulit untuk dibedakan apakah sebagai proses atau karakter bawaan manusia. Ekonomi kreatif merupakan salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi yang paling utama. Howkins, 1997 menjelaskan ekonomi kreatif sebagai “kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang

Tujuan

Menyediakan program Diklat pengelolaan ekonomi kreatif yang bersifat Integratif dan Aplikatif untuk meningkatkan kompetensi ASN pada tingkat pelaksana di pusat daerah

Kriteria Peserta

- Merupakan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Diusulkan oleh unit kerjanya.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan.
- Peserta merupakan ASN yang memiliki tupoksi pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tingkat pusat dan daerah

Indikator Keberhasilan

Menyediakan program Diklat pengelolaan ekonomi kreatif yang bersifat Integratif dan Aplikatif untuk meningkatkan kompetensi ASN pada tingkat pelaksana di pusat daerah

Materi

- Profil Ekonomi Kreatif
- Perkembangan Ekraf
- Pembangunan Ekraf di Indonesia
- Pengetahuan Dasar Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- Pengetahuan Dasar Karya Ekonomi Kreatif
- Pengetahuan Dasar Pasar Ekonomi Kreatif
- Pengetahuan Dasar Riset Ekonomi Kreatif
- Peran Akademisi dan Komunitas Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Peran Komunitas dan Sektor Bisnis
- Pengetahuan Sub Sektor Ekonomi Kreatif



PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI

Tanggal Pelatihan	: 2 - 11 Februari 2022
Kuota Peserta	: 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 80 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Pelatihan monitoring dan evaluasi Kemenparekraf/Baparekraf ini dilaksanakan atas kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan dengan tema monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan di Indonesia sesuai dengan skema yang ada dalam SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang terdapat pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2004. Pelatihan ini dilatar-belakangi oleh belum efektifnya kegiatan pembangunan selama ini. Terdapat tumpang tindihnya kewenangan, baik dari sisi anggaran, pelaksana maupun lokasi, serta banyaknya output kegiatan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Indikator Keberhasilan

Pelatihan monitoring (pemantauan) dan evaluasi Kemenparekraf/Baparekraf ini dilaksanakan atas kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Kegiatan ini merupakan kegiatan

Tujuan

- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang konsep dan sistem Pemantauan dan Evaluasi;
- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses Pemantauan dan Evaluasi pembangunan;
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun konsep dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang menjabat sebagai Analis Perencana atau Staf yang mengelola Perencanaan
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Materi

- Pembangunan dan Manajemen Pembangunan
- Siklus Manajemen: Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- Perencanaan Program dan Proyek sebagai dasar pemantauan dan evaluasi
- Metode evaluasi
- Konsep dan pengukuran value for money
- SPPN dan pemantauan serta pengendalian proyek di Indonesia
- Sistem dan model pemantauan dan evaluasi di Indonesia saat ini
- Kinerja dan pelaksanaan anggaran di Indonesia
- Pengembangan Evaluasi Kinerja Program dan proyek di Indonesia
- Akuntabilitas kinerja pemerintah
- Overview tentang pembangunan
- Manajemen proyek
- Manajemen Pembangunan
- Framework pemantauan dan evaluasi
- Praktek-praktek pengembangan strategi dan kriteria
- Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi
- Penerapan Informasi dan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi
- Overview Penyusunan Pemantauan dan evaluasi domestik
- Kunjungan lapangan dan latihan/simulasi/ praktek pemantauan dan evaluasi.

PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH



Tanggal Pelatihan	: 27 - 29 September 2022
Kuota Peserta	: 40 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 26 JP
Metode Pelatihan	: Luring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah ini dibutuhkan sebagai dasar untuk memiliki pemahaman yang mencakup pengertian, jenis, manfaat, tujuan dan ciri umum dari karya tulis ilmiah. Dengan mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai pengertian, jenis-jenis karya ilmiah serta penerapannya, diharapkan dapat memahami hakekat dan konsep dasar Karya Tulis Ilmiah. Menyadari pentingnya kemampuan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi PNS di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melaksanakan pelatihan ini bekerja sama dengan Widyaiswara yang kompeten

Tujuan

- Memiliki pemahaman yang utuh dan padu mengenai hakikat karya tulis ilmiah; dan
- Memiliki dan memahami pengertian dan jenis-jenis karya tulis ilmiah secara mendalam dan rinci

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Menjelaskan pengertian atau deskripsi masing-masing jenis karya ilmiah
- Mengklasifikasikan berbagai jenis karya tulis ilmiah menurut bentuk dan fungsinya
- Memberi contoh setiap jenis karya tulis ilmiah
- Menjelaskan kaidah penyusunan karya tulis ilmiah
- Menjelaskan etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah

Materi

- Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Penelitian/Kajian/Survei/Evaluasi di Bidang Jabatan Fungsional
- Seputar Jurnal Nasional dan Internasional
- Mengupas Masalah Seputar Jurnal Nasional dan Internasional dan Praktik Penulisan Jurnal Nasional dan Internasional
- Seputar Penyusunan Naskah dan Artikel di Bidang Jabatan Fungsional yang di Publikasikan
- Praktik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
- Coaching Clinic* Hasil Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
- Pemaparan Hasil Penulisan



PELATIHAN *PUBLIC SPEAKING*



Tanggal Pelatihan : 19 - 20 Juli 2022
Kuota Peserta : 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan : 16 JP
Metode Pelatihan : Daring
Penyelenggara : Pusbang SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau banyak orang. Public speaking diperlukan karena pada dasarnya setiap orang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengetahui kemampuan public speaking, kita dapat menjalin interaksi tersebut dengan lebih baik. Dalam konteks dunia kerja, arus komunikasi antara atasan, bawahan, dan sesama rekan sekerja (peer) bahkan dengan pihak lain yang terkait dalam kegiatan suatu pekerjaan akan sangat berdampak pada kinerja semua unsur yang ada di lingkungan dunia kerja tersebut. Oleh karena itu, siapa pun yang memasuki dunia kerja harus menyadari dan memahami pentingnya efektivitas komunikasi dalam menjalin hubungan yang sehat di lingkungan tempatnya bekerja termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menyadari pentingnya kemampuan public speaking bagi PNS di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melaksanakan pelatihan ini bekerja sama dengan praktisi yang kompeten.

Tujuan

- Mempelajari bagaimana teknik berbicara dengan penuh percaya diri
- Vokal dan bahasa tubuh yang berwibawa
- Memiliki kemampuan teknik presentasi yang memukau

Kriteria Peserta

- PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Menemukan potensi dan meningkatnya rasa percaya diri
- Menguasai Teknik komunikasi nonverbal
- Menguasai Teknik komunikasi verbal
- Mampu menciptakan dinamika presentasi yang hidup

Materi

- Writing an Effective Speech : Key Points to Remember*
- Examination of Good Speeches & Pre-Speech Preparation*
- Practical Guidelines and Tips on Public Speaking*
- Simulation of Speech Writing and Public Speaking and Feedback Session*



PELATIHAN ESQ

Latar Belakang

Pelatihan ESQ memiliki tujuan untuk para insan Kemenparekraf agar selalu optimis dan yakin, memahami dan mempersiapkan diri menghadapi VUCA era, dan dapat menemukan hikmah dibalik pandemi Covid-19. Dengan menanamkan rasa bahagia, membentuk emosi positif, dan semangat GerCep, GeBer, GasPol sehingga bisa *survive* menghadapi segala tantangan di masa pandemi Covid-19." Dengan mengikuti *training* ini diharapkan para peserta dapat mengerti dan memahami pentingnya pikiran bawah sadar memengaruhi sebagian besar kehidupan manusia. *Training* ini juga bertujuan untuk bagaimana peserta dapat mengontrol ketakutan dalam diri dan meresponnya dengan *positive feeling*, *positive thinking* dan *positive action* sehingga mendapatkan *positive result*

Tujuan

- Pelatihan ESQ bertujuan untuk pegawai di Kemenparekraf/Baparekraf agar selalu optimis dan yakin, memahami dan mempersiapkan diri menghadapi era VUCA, dan dapat menemukan hikmah dibalik permasalahan. Dengan menanamkan rasa bahagia, membentuk emosi positif, dan semangat GerCep, GeBer, GasPol;
- Peserta dapat mengontrol ketakutan dalam diri dan meresponnya dengan *positive feeling*, *positive thinking* dan *positive action* sehingga mendapatkan *positive result*

Tanggal Pelatihan	: 29 - 30 November 2022
Kuota Peserta	: 200 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 16 JP
Metode Pelatihan	: <i>Blended Learning</i>
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria Peserta

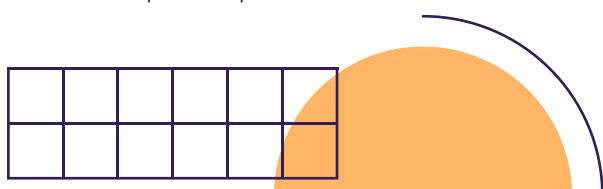
- ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Persetujuan mengikuti pelatihan dari kepala unit kerja
- Berkomitmen dengan jadwal pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Adanya pengaruh untuk bekerja lebih giat
- Adanya pengaruh untuk meningkatkan kualitas kerja
- Adanya pengaruh untuk memberikan pelayanan terbaik
- Adalah pengaruh dalam meningkatkan komunikasi kerja
- Adanya perasaan berhasil dan kesadaran untuk ingin berkembang

Materi

- Managing State*
- Why Culture Transformation*
- The Grand Why*
- Programming Memory Bank*
- Controlling Amygdala & Activating Ras*
- Managing Response*



2022



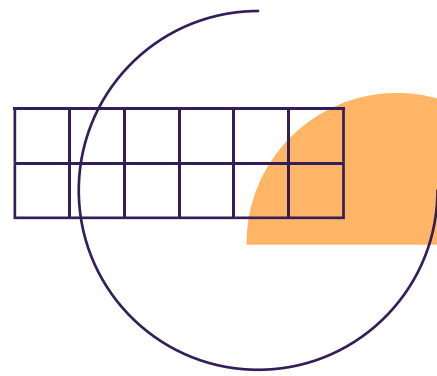
Program Pelatihan

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TRAINING OF TRAINER

PELATIHAN PARIWISATA DASAR



Tanggal Pelatihan	: 14 - 17 Februari 2022
Kuota Peserta	: 34 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 44 JP
Metode Pelatihan	: Luring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi seorang pengajar dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan. Banyak pengajar yang sangat berpengalaman namun tidak memiliki kemampuan dalam mengajarkan bidang yang dikuasainya kepada orang lain. Dalam menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata para pengajar perlu diberikan penyegaran dan standardisasi untuk menyamakan dan meningkatkan kualitasnya. Penyegaran tersebut diberikan dalam bentuk konsep, aplikasi, dan kebijakan yang perlu diselaraskan dengan tujuan dan fungsi dari Kemenparekraf/Baparekraf

Tujuan

- Meningkatkan dan menyamakan kompetensi para dosen dari Politeknik Pariwisata dalam memberikan materi dan pengetahuan tentang Pariwisata tingkat Dasar.
- Memberikan kemampuan bagi pada dosen untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mendefinisikan tujuan pelatihan, menyajikan materi pelatihan, dan merumuskan metode untuk mengevaluasi pelatihan.
- Memastikan para dosen dari masing-masing Politeknik Pariwisata mampu mengevaluasi kembali pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar di bidang pariwisata

Kriteria Peserta

- Merupakan dosen yang berasal dari masing-masing Politeknik Pariwisata dan Widyaiswara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Diusulkan oleh Pimpinan di Unit Kerjanya.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki pengetahuan terkait pilar-pilar pariwisata.
- Terwujudnya peserta ToT yang bisa mengembangkan metode pembelajaran dan memberikan contoh implementasi penerapan pembelajaran yang selaras dengan kebijakan dan substansi lembaga.
- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki kemampuan menguraikan RBPP, mengembangkan RBPMP dan RP

Materi

- Overview Program Pelatihan / Membangun Persepsi Bersama
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Pembelajaran Orang Dewasa
- RBPP dan RBPMP/RP
- Metode Pembelajaran
- Konsep Dasar Kepariwisata
- Pengetahuan Industri Pariwisata
- Pengetahuan Dasar Pemasaran Pariwisata
- Pengetahuan Dasar Kelembagaan Pariwisata
- Pengetahuan Teknologi Informasi
- Media Pembelajaran
- Evaluasi Pembelajaran
- Manajemen Kelas
- Penyusunan Bahan Microteaching
- Microteaching

TRAINING OF TRAINER

PELATIHAN PARIWISATA MENENGAH

Latar Belakang

Keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi seorang pengajar dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan. Banyak pengajar yang sangat berpengalaman namun tidak memiliki kemampuan dalam mengajarkan bidang yang dikuasainya kepada orang lain. Dalam menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata para pengajar perlu diberikan penyegaran dan standardisasi untuk menyamakan dan meningkatkan kualitasnya. Penyegaran tersebut diberikan dalam bentuk konsep, aplikasi, dan kebijakan yang perlu diselaraskan dengan tujuan dan fungsi dari Kemenparekraf/Baparekraf. Setelah mengikuti Training of Trainer Pariwisata Tingkat Dasar para widyaiswara dan dosen di Politeknik Pariwisata diharapkan dapat melanjutkan Training of Trainer Pariwisata Tingkat Menengah dalam rangka menjalankan continuous learning and improvement

Materi

- Overview Program Pelatihan / Membangun Persepsi Bersama
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Pembelajaran Orang Dewasa
- RBPP dan RBPMP/RP
- Metode Pembelajaran
- Pengembangan Produk Pariwisata
- Pemasaran Pariwisata
- Industri Pariwisata
- Penguatan Kelembagaan Parekraf
- Media Pembelajaran
- Evaluasi Pembelajaran
- Manajemen Kelas
- Penyusunan Bahan Microteaching
- Microteaching

Tanggal Pelatihan	: 25 - 28 Juli 2022
Kuota Peserta	: 30 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 40 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: PPSDM Parekraf

Tujuan

- Meningkatkan dan menyamakan kompetensi para pengajar dalam memberikan materi dan pengetahuan tentang Pariwisata tingkat Dasar.
- Memberikan kemampuan bagi para Pengajar untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mendefinisikan tujuan pelatihan, menyajikan materi pelatihan, dan merumuskan metode untuk mengevaluasi pelatihan.
- Memastikan para pengajar mampu mengevaluasi kembali pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar di bidang pariwisata

Kriteria Peserta

- Merupakan dosen yang berasal dari masing-masing Politeknik Pariwisata dan Widyaiswara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Diusulkan oleh Pimpinan di Unit Kerjanya.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki pengetahuan terkait pilar-pilar pariwisata.
- Terwujudnya peserta ToT yang bisa mengembangkan metode pembelajaran dan memberikan contoh implementasi penerapan pembelajaran yang selaras dengan kebijakan dan substansi lembaga.
- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki kemampuan menguraikan RBPP, mengembangkan RBPMP dan RP

TRAINING OF TRAINER PELATIHAN EKONOMI KREATIF DASAR

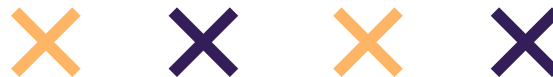


Latar Belakang

Keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi seorang pengajar dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan. Dalam menyelenggarakan pelatihan di Bidang Ekonomi Kreatif para pengajar perlu diberikan pengetahuan, keterampilan, dan standarisasi untuk menyamakan dan meningkatkan kualitasnya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diberikan dalam bentuk konsep, aplikasi, dan kebijakan yang perlu diselaraskan dengan tujuan dan fungsi dari Kemenparekraf/Baparekraf dalam bidang Ekonomi Kreatif. Training of Trainer perlu diikuti oleh Widyaiswara dan Dosen dari Politeknik Pariwisata agar pemahaman terkait bidang Ekonomi Kreatif bisa didapatkan dengan baik dan terstandar bagi masing-masing Widyaiswara dan Dosen

Materi

- Overview Program Pelatihan / Membangun Persepsi Bersama
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Pembelajaran Orang Dewasa
- RBPP dan RBPMP/RP
- Metode Pembelajaran
- Konsep Dasar Ekonomi Kreatif
- Pengetahuan Dasar Ekosistem Ekonomi Kreatif
- Pengetahuan Dasar Pentahelix Stakeholder
- Pengetahuan Dasar Sub Sektor Ekonomi Kreatif
- Media Pembelajaran
- Evaluasi Pembelajaran
- Manajemen Kelas
- Penyusunan Bahan Microteaching
- Microteaching



Tanggal Pelatihan	: 21 - 24 Juni 2022
Kuota Peserta	: 28 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 40 JP
Metode Pelatihan	: Luring
Penyelenggara	: PPSDM Parekraf

Tujuan

- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki pengetahuan terkait fokus-fokus di bidang ekonomi kreatif.
- Terwujudnya peserta ToT yang bisa mengembangkan metode pembelajaran dan memberikan contoh implementasi penerapan pembelajaran yang selaras dengan kebijakan dan substansi lembaga.
- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki kemampuan menguraikan RBPP, mengembangkan RBPMP dan RP

Kriteria Peserta

- Merupakan Dosen yang berasal dari masing-masing Politeknik Pariwisata dan Widyaiswara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Diusulkan oleh Pimpinan di Unit Kerjanya.
- Mampu mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan

Indikator Keberhasilan

- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki pengetahuan terkait fokus-fokus di bidang ekonomi kreatif.
- Terwujudnya peserta ToT yang bisa mengembangkan metode pembelajaran dan memberikan contoh implementasi penerapan pembelajaran yang selaras dengan kebijakan dan substansi lembaga.
- Terwujudnya peserta ToT yang memiliki kemampuan menguraikan RBPP, mengembangkan RBPMP dan RP

WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN EKONOMI KREATIF MENENGAH



Tanggal Pelatihan	: 30 - 31 Maret 2022
Kuota Peserta	: 20 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 16 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak dan wajib untuk mengembangkan kompetensi. Sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu memerlukan pengembangan kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif seperti Pelatihan Teknis Ekonomi Kreatif. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah Kurikulum dengan muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai. Maka dari itu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Workshop penyusunan kurikulum yang berfokus pada pelatihan Ekonomi Kreatif Menengah untuk menghasilkan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Menengah yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai

Kriteria Peserta

- Pegawai Pengelola Pelatihan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti pelatihan
- Mendapatkan izin dari atasan

Tujuan

Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Menengah ini, bertujuan untuk menghasilkan Kurikulum, GBHN, Bahan Pelatihan, dan Pedoman bagi Fasilitator yang tepat memenuhi kriteria yang disyaratkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Menengah yang siap untuk digunakan dalam kegiatan Pelatihan Teknis Ekonomi Kreatif Menengah

Indikator Keberhasilan

- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan kurikulum
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan GBHN
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan bahan pelatihan
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan pedoman bagi fasilitator

Materi

- Prinsip penyusunan Kurikulum
- Tahap – tahap dan proses penyusunan Kurikulum
- Pokok – pokok penyusunan kurikulum diklat teknis dan fungsional
- Pokok penyusunan GBHN
- Langkah penyusunan bahan diklat
- Langkah – Langkah penyusunan pedoman bagi fasilitator
- Penyamaan persepsi materi pelatihan ekonomi kreatif menengah
- Excercise

WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN EKONOMI KREATIF LANJUTAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak dan wajib untuk mengembangkan kompetensi. Sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu memerlukan pengembangan kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif seperti Pelatihan Teknis Ekonomi Kreatif Lanjutan yang ditujukan kepada Pegawai di Bidang Pariwisata pada jenjang pimpinan tinggi. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah Kurikulum. Kurikulum dengan muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pimpinan yang merupakan pengambil kebijakan dalam pemerintah. Hal tersebut tentu berbeda dengan kompetensi pegawai biasa. Maka dari itu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Workshop penyusunan kurikulum yang berfokus pada pelatihan Ekonomi Kreatif Lanjutan untuk menghasilkan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai

Tujuan

Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Lanjutan ini, bertujuan untuk menghasilkan Kurikulum, GBHN, Bahan Pelatihan, dan Pedoman bagi Fasilitator yang tepat memenuhi kriteria yang disyaratkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Kurikulum Pelatihan Ekonomi Kreatif Lanjutan yang siap untuk digunakan dalam kegiatan Pelatihan Teknis Ekonomi Kreatif Lanjutan

Tanggal Pelatihan	: 29 - 30 Juni 2022
Kuota Peserta	: 20 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 16 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria Peserta

- Pegawai Pengelola Pelatihan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti pelatihan
- Mendapatkan izin dari atasan

Indikator Keberhasilan

- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan kurikulum
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan GBHN
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan bahan pelatihan
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan pedoman bagi fasilitator

Materi

- Prinsip penyusunan Kurikulum
- Tahap – tahap dan proses penyusunan Kurikulum
- Pokok – pokok penyusunan kurikulum diklat teknis dan fungsional
- Pokok penyusunan GBHN
- Langkah – langkah penyusunan bahan diklat
- Langkah – langkah penyusunan pedoman bagi fasilitator
- Penyamaan persepsi materi pelatihan ekonomi kreatif lanjutan
- Excercise

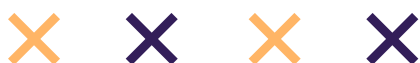
WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN PARIWISATA LANJUTAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak dan wajib untuk mengembangkan kompetensi. Sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentu memerlukan pengembangan kompetensi di bidang Pariwisata seperti Pelatihan Teknis Pariwisata Lanjutan yang ditujukan kepada Pegawai di Bidang Pariwisata pada jenjang pimpinan tinggi. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah Kurikulum. Kurikulum dengan muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pimpinan yang merupakan pengambil kebijakan dalam pemerintah. Hal tersebut tentu berbeda dengan kompetensi pegawai biasa. Maka dari itu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Workshop penyusunan kurikulum yang berfokus pada pelatihan Pariwisata Lanjutan untuk menghasilkan Kurikulum Pelatihan Pariwisata Lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai

Tujuan

Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pariwisata Lanjutan ini, bertujuan untuk menghasilkan Kurikulum, GBHN, Bahan Pelatihan, dan Pedoman bagi Fasilitator yang tepat memenuhi kriteria yang disyaratkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Kurikulum Pelatihan Pariwisata Lanjutan yang siap untuk digunakan dalam kegiatan Pelatihan Teknis Pariwisata Lanjutan



Tanggal Pelatihan	: 12 - 31 Mei 2022
Kuota Peserta	: 20 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 16 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria Peserta

- Pegawai Pengelola Pelatihan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti pelatihan
- Mendapatkan izin dari atasan

Indikator Keberhasilan

- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan kurikulum
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan GBHN
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan bahan pelatihan
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan pedoman bagi fasilitator

Materi

- Prinsip penyusunan Kurikulum
- Tahap – tahap dan proses penyusunan Kurikulum
- Pokok – pokok penyusunan kurikulum diklat teknis dan fungsional
- Pokok penyusunan GBHN
- Langkah – Langkah penyusunan bahan diklat
- Langkah – Langkah penyusunan pedoman bagi fasilitator
- Penyamaan persepsi materi pelatihan pariwisata lanjutan
- Excercise

WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL PELATIHAN PARIWISATA DEKON

Latar Belakang

Berdasarkan Permenparekraf/Kepala Baparekraf Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif salah satu program dalam peraturan tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif (SDM Parerkraf). Kegiatan pengembang SDM Parekraf tersebut dapat berupa workshop atau pelatihan. Sebagaimana pemanfaatan dana dekonsentrasi yang ditujukan untuk asn daerah, asn di daerah memerlukan pengembangan kompetensi berupa pelatihan pariwisata yang tentu akan berbeda dengan materi pelatihan pariwisata secara umum. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah Kurikulum. Kurikulum dengan muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Maka dari itu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Workshop penyusunan kurikulum yang berfokus pada Pelatihan Pariwisata untuk Dana Dekonsentrasi untuk menghasilkan Kurikulum Pelatihan Pariwisata untuk Dana Dekonsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi ASN di daerah

Tujuan

Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pariwisata untuk Dana Dekonsentrasi ini, bertujuan untuk mengasilkan Kurikulum, GBHN, Bahan Pelatihan, dab Pedoman bagi Fasilitator yang tepat memenuhi kriteria yang disyaratkan. melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengasilkan kurikulum pelatihan ekonomi kreatif lanjutan yang siap untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan pariwisata untuk dana dekonsentrasi

Tanggal Pelatihan	: 30 - 31 Mei 2022
Kuota Peserta	: 20 Peserta
Jumlah Jam Pelatihan	: 16 JP
Metode Pelatihan	: Daring
Penyelenggara	: Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kriteria Peserta

- Pegawai Pengelola Pelatihan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf
- Mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti pelatihan
- Mendapatkan izin dari atasan

Indikator Keberhasilan

- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan kurikulum
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan GBHN
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan bahan pelatihan
- Memahami dan mengimplementasikan tata cara penyusunan pedoman bagi fasilitator

Materi

- Prinsip prinsip penyusunan kurikulum
- Tahap – tahap dan proses penyusunan kurikulum
- Pokok – pokok penyusunan kurikulum diklat teknis dan fungsional
- Pokok penyusunan gbhn
- Langkah langkah penyusunan bahan diklat
- Langkah – langkah penyusunan pedoman bagi fasilitator
- Penyamaan persepsi materi pelatihan pariwisata untuk dana dekonsentrasi
- Excercise*



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ni Wayan Giri Adnyani

Penanggung Jawab:

Faisal

Ketua:

Fransiskus Handoko

Wakil Ketua:

Joko Abu Bakir

Sekretaris:

Amalia Diani

Anggota:

Sri Susiati, Eka Pan Lestari, Suwanto,
Denny Farabi, Helmi Suhendri, Qorizki
Muharani, Devia Sugesti

Editor Konten:

F.Meitriana Erny Wuryansar
Septi Mutiara Janing K
Dimas Irawan

Sekretariat:

Septian Achmad, Defrimont Era, Reysa
Hastarimasuci, Azlica Octaria, Jajang
Nurjaman, Nining Dewi Laraswati



Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 47-48, RT.3/RW.3, Cikoko, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

2022